



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 59 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, perlu mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk keberhasilan pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental;
 - b. bahwa Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Tabalong harus dilaksanakan oleh seluruh unsur Aparatur Sipil Negara, Swasta, dan Masyarakat di Kabupaten Tabalong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 179);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Gerakan Nasional Revolusi Mental (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1207);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 02);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 11);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 61);
20. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan dan strategi pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Tabalong;

- b. merencanakan program dan anggaran serta melaksanakan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Tabalong;
- c. melaksanakan sosialisasi dan edukasi Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada masyarakat;
- d. melaksanakan kerjasama Gerakan Nasional Revolusi Mental dengan pelaku Gerakan Nasional Revolusi Mental;
- e. menyusun petunjuk teknis Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Tabalong melalui Peraturan Bupati Tabalong;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Tabalong;
- g. melaporkan pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental kepada gugus tugas Provinsi Kalimantan Selatan setiap 4 (empat) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- h. menyiapkan sistem dan menangani pengaduan.

- KETIGA** : Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong selaku Ketua Harian Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Tabalong mengkoordinasikan pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Tabalong.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 08 Februari 2022.

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI *MS*

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ /2022
TANGGAL

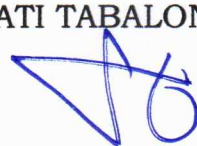
SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS GERAKAN NASIONAL REVOLUSI
MENTAL KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

| NO | JABATAN DALAM DINAS | JABATAN DALAM GUGUS | KET |
|-----|--|---|-----|
| 1. | Bupati Tabalong | Ketua | |
| 2. | Wakil Bupati Tabalong | Wakil Ketua | |
| 3. | Sekretaris Daerah Kab. Tabalong | Pelaksana Harian | |
| 4. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong | Sekretaris | |
| 5. | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kab. Tabalong | Koordinator Bidang Gerakan Indonesia Melayani | |
| 6. | Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Tabalong | Anggota | |
| 7. | Kepala Dinas Kesehatan Kab. Tabalong | Anggota | |
| 8. | Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Tabalong | Anggota | |
| 9. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tabalong | Anggota | |
| 10. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tabalong | Anggota | |
| 11. | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tabalong | Anggota | |
| 12. | Kepala Dinas Sosial Kab. Tabalong | Anggota | |
| 13. | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Tabalong | Anggota | |
| 14. | Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Badaruddin Kasim Kab. Tabalong | Anggota | |
| 15. | Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong | Anggota | |
| 16. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong | Anggota | |
| 17. | Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong | Anggota | |
| 18. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kab. Tabalong | Koordinator Bidang Gerakan Indonesia Bersih | |
| 19. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong | Anggota | |
| 20. | Inspektur Daerah Kab. Tabalong | Anggota | |
| 21. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Tabalong | Anggota | |

| | | | |
|-----|---|--|--|
| 22. | Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kab. Tabalong | Anggota | |
| 23. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tabalong | Anggota | |
| 24. | Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong | Anggota | |
| 25. | Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong | Anggota | |
| 26. | Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong | Anggota | |
| 27. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Tabalong | Koordinator Bidang Gerakan Indonesia Tertib | |
| 28. | Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kab. Tabalong | Anggota | |
| 29. | Kepala Dinas Perhubungan Kab. Tabalong | Anggota | |
| 30. | Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. Tabalong | Anggota | |
| 31. | Kepala Badan Narkotika Nasional Kab. Tabalong | Anggota | |
| 32. | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tabalong | Anggota | |
| 33. | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tabalong | Anggota | |
| 34. | Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong | Anggota | |
| 35. | Pejabat Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa Politik Kab. Tabalong | Anggota | |
| 36. | Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong | Anggota | |
| 37. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kab. Tabalong | Koordinator Bidang Gerakan Indonesia Mandiri | |
| 38. | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tabalong | Anggota | |
| 39. | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kab. Tabalong | Anggota | |
| 40. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Tabalong | Anggota | |
| 41. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tabalong | Anggota | |
| 42. | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong | Anggota | |

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 43. | Pejabat Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong | Anggota | |
| 44. | Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong | Anggota | |
| 45. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kab. Tabalong | Koordinator Bidang Gerakan Indonesia Bersatu | |
| 46. | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kab. Tabalong | Anggota | |
| 47. | Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kab. Tabalong | Anggota | |
| 48. | Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Tabalong | Anggota | |
| 49. | Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kab. Tabalong | Anggota | |
| 50. | Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kab. Tabalong | Anggota | |
| 51. | Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kab. Tabalong | Anggota | |
| 52. | Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kab. Tabalong | Anggota | |
| 53. | Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kab. Tabalong | Anggota | |
| 54. | Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kab. Tabalong | Anggota | |
| 55. | Pejabat Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong | Anggota | |
| 56. | Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Tabalong | Anggota | |

BUPATI TABALONG, 2



ANANG SYAKHFIANI 1/11